

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Seiring berkembang pesatnya teknologi organisasi sektor publik di masyarakat. Kebutuhan masyarakat pun juga ikut meningkat seiring dengan perkembangannya jaman. Pemerintah menunjukkan perannya dengan menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat yang ditujukan sepenuhnya untuk masyarakat luas. Keseriusan pemerintah dalam menyediakan fasilitas umum ini dapat dengan mudah dinilai oleh masyarakat melalui kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang ikut terkait tentu akan berjalan dengan baik juga apabila pemerintahan yang baik telah berhasil diwujudkan (Raharja, Herawati & Purnamawati, 2015).

Akuntansi sektor publik itu sendiri adalah akuntansi yang dipakai dalam suatu organisasi di dalam suatu pemerintahan atau suatu lembaga yang tidak hanya untuk mendapatkan suatu keuntungan, tetapi juga merupakan suatu bagian dari kedisiplinan ilmu. Masyarakat menuntut agar pemerintah dapat mengelola anggaran secara akuntabel, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Sasaran dalam pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Perkembangan teknologi dan ekonomi merupakan acuan dasar dalam mengelola laporan keuangan, sehingga dapat tercipta pemerintah yang baik yang dapat pula disebut Good governance. Bersatu dan mempunyai tekad untuk mewujudkan pemerintah yang baik atau amanah (good governance) yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. (Raharja, Herawati & Purnamawati, 2015).

Good Governance itu sendiri dapat dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level di dalam suatu negara. Good Governance juga memiliki beberapa indikator seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Dari semua indikator tersebut, hal yang paling penting dalam Good Governance adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik. Di dalam pelaksanaan Good Governance meliputi beberapa karakteristik yang dapat dipenuhi yaitu transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency dan

effectiveness, serta accountability. (Auditya, Husaini & Lismawati, 2013)

Mewujudkan tujuan dan cita-cita masyarakat maka syarat yang dipenuhi pemerintah yaitu dengan dilaksanakannya Good Governance. Otonomi daerah yang diberlakukan secara efektif membuat perubahan signifikan dan fundamental pada negara Indonesia. Ini disambut dengan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dipengaruhi berubahnya pandangan pemerintah dari terpusat ke otonomi daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bertata kelola baik (*Good Governance*). Konsekuensi bagi daerah yakni dituntut untuk mempertanggungjawabkan alokasi dana yang dimiliki secara efisien dan efektif. Pengalokasian dana yang sebaik-baiknya, maka implikasinya pada pertumbuhan daerah yang dapat berjalan sesuai harapan. (Premananda & Latrini , 2017)

Untuk melaksanakan kewenagannya, pemerintah kabupaten atau kota harus berjalan diatas kebijakan, standart, norma, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat agar arah pembangunan tetap terjaga pada satu tujuan yaitu Tujuan Pembangunan Nasional. Dan juga sumber dana yang diberdayakan oleh pemerintah daerah salah satunya dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus, dan Dekonsentrasi maupun dana bagi hasil, oleh karena

itu pemerintah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan yang menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. ada beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan keuangan yaitu aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran. (Auditya, Husaini & Lismawati , 2013)

Selanjutnya, berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara khususnya dalam pengendalian, dapat dilihat seberapa besar BBPJN VIII (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII) mampu melaksanakan elemen-elemen manajemen keuangan negara yang diperlukan meliputi Akuntabilitas keuangan, Transparansi, dan Pengawasan. Tiga variabel ini dapat dijadikan ukuran terhadap keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan. Dalam menciptakan good governance dengan akuntabilitas publik yang baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan harus diupayakan sesederhana mungkin sehingga mudah untuk dianalisis keterukurannya (akuntable), dan dapat diakses dengan mudah (transparansi) oleh publik. Untuk itu dikembangkanlah format yang lebih sederhana pada setiap variabel namun tetap sesuai dengan sistem dan standar akuntansi keuangan pemerintah yang baku. (Premananda & Latrini , 2017)

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas segala aktifitas yang dilakukan oleh seseorang

pemegang amanah terhadap orang atau badan yang meminta pertanggungjawaban tersebut, akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dari pada kegiatan operasional suatu perusahaan. Pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. Terwujudnya akuntabilitas keuangan akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan. (Raharja, Herawati & Purnamawati, 2015).

Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat untuk mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya alam artinya penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Akuntabilitas itu sendiri juga bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. (Permata dkk, 2014)

Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang

dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang transparan pada rakyatnya. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup – tutupi mengenai proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya

Pengawasan merupakan rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Pengawasan dilakukan untuk menjamin semua kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Adanya lembaga-lembaga pengawasan dapat menunjukkan bahwa pemerintah ingin menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dengan memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan asas Good Governance.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Namun untuk membantu tugas Kepala Pemerintahan maka kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya dan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah.

Tahapan pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan. Semuanya sudah diatur di dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

APBN adalah instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan pencapaian pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan nasional, stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Penganggaran keuangan negara adalah suatu proses penyusunan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan pertanggung-jawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalam satu tahun yang menjadi tanggung jawab dari Menteri dan Kepala Lembaga. (Premananda & Latrini, 2017)

Pengelolaan anggaran memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari akuntabilitas sebagai hal yang

sangat penting sebagai penjamin efektivitas dan efisiensi. Secara tradisional, akuntabilitas telah dikaitkan dengan pemanggilan seorang individu untuk menjelaskan atas tindakan yang mereka lakukan kepada beberapa otoritas yang lebih tinggi, dengan penekanan pada pengawasan eksternal dan ancaman sanksi potensial. Agen dan principal, dimana agen bertanggungjawab prinsipal untuk tindakannya. Identitas principal mempengaruhi arah dimana akuntabilitas dilaksanakan: mungkin ke atas (ke otoritas yang lebih tinggi), ke bawah (ke warga atau masyarakat), atau ke samping (sebagai bagian dari kontrak yang telah disepakati untuk saling menguntungkan). (Premananda & Latrini , 2017)

Dilansir di web resmi [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) bahwa pada tanggal 5/8/2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan Sosialisasi Peran BPK dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara. Tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara tersebut adalah untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII (BBPJN VIII) merupakan suatu kementerian yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Dilansir dari web [www.potretkota.com](http://www.potretkota.com) pada tanggal 27/02/19 menjelaskan bahwa BBPJN VIII dianggap abaikan proyek yang bermasalah. Banyak item pekerjaan yang belum tergarap atau tidak sesuai spek, padahal APBN sudah terbayarkan. Dengan hal ini berarti pemerintah belum sepenuhnya dapat mensejahterakan masyarakat, padahal tugas utama negara



berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama dibidang ekonomi dan sosial masyarakat.

Penulis berminat untuk melakukan kajian dan analisis terhadap variabel – variabel yang menjadi tolak ukur pengelolaan keuangan negara yang meliputi **Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan**. Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII (BBPJN VIII). Karena BBPJN VIII merupakan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang melayani masyarakat pada bidang pembangunan jalan nasional.

Penelitian ini dikembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh alqodri yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas keuangan, Pengawasan dan penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah (studi pada pemerintah kota dumai)”** perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian dan ruang lingkup penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di pemerintah Kota dumai, sedangkan penelitian ini dilakukan di BBPJN VIII. Penelitian ini tentang **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII**.

Penelitian ini sangat penting karena bertujuan untuk mengetahui keakuratan pelaporan keuangan di pemerintahan. Maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh

## Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BBPJM VIII

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan pada BBPJM VIII
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan pada BBPJM VIII
3. Apakah Pengawasan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan pada BBPJM VIII

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari perumusan masalah yang telah di uraikan, peneliti ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan pada BBPJM VIII
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan pada BBPJM VIII
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan pada BBPJM VIII

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### 1. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru mengenai Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII

##### 2. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam mengadakan perbaikan dan koreksi yang diperlukan, sehingga pada akhirnya dapat menunjukkan kinerja yang optimal.

##### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang berarti bagi ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan referensi bagi para peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin meneliti Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan.